



STRATEGI KOMUNIKASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN PANTAI UTARA DI KABUPATEN BATANG

Nugraheni Arumsari¹□, Wenny Dwika Paradita², Tutik Wijayanti³

Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

History of Article

Received September 2019

Accepted November 2019

Published January 2020

Keywords: Strategy, Communication, Conflict, Fishermen

Kata kunci : Strategi, Komunikasi, Konflik, Nelayan

Abstract

Conflict is a social phenomenon that will always be inherent in the lives of every community. Therefore conflicts cannot be eliminated (Nasikun, 2003). Conflict will only disappear along with the disappearance of society itself. Therefore, the conflict can be controlled so that it does not become a form of violence. Such as fishermen conflict with the government that opposes the Ministerial Regulation number 2/2015 regarding the prohibition of using cantrang or trawl reinforcements that occur in Batang Regency. The protest ended in a clash with the police. Data collection was carried out by interview, observation and document study methods with a focus on conflict management efforts as an effective conflict resolution communication strategy. Communication strategies for resolving conflict fishermen on the north coast of Batang Regency, referring to several indicators, namely (1) leadership in the form of a leader strategy in conflict management using the form of an open forum through direct communication (2) communication strategies used with a group communication approach and persuasive communication through training and counseling and (3) community participation in conflict resolution through the provision of facilities and infrastructure and also leadership participation in organization.

Abstrak

Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu konflik tidak mungkin dilenyapkan. Konflik hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi dapat dikendalikan agar tidak menjadi bentuk kekerasan. Seperti konflik nelayan dengan pemerintah yang menentang adanya Peraturan Menteri nomor 2/2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang atau pukot bala yang terjadi di Kabupaten Batang. Aksi protes tersebut berakhir dengan sebuah bentrokan dengan aparat kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk memetakan strategi komunikasi dalam manajemen konflik para nelayan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri nomor 2/2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang atau pukot bala. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen dengan fokus terkait upaya manajemen konflik sebagai salah satu strategi komunikasi penyelesaian konflik yang efektif. Strategi komunikasi penyelesaian konflik nelayan di pantai utara Kabupaten Batang, mengacu pada beberapa indikator yaitu (1) kepemimpinan yang berupa strategi pemimpin dalam pengelolaan konflik dengan menggunakan bentuk forum terbuka melalui komunikasi secara langsung (2) strategi komunikasi yang digunakan

dengan pendekatan komunikasi kelompok dan komunikasi persuasif melalui pelatihan dan penyuluhan dan (3) partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui penyediaan sarana dan prasarana dan juga partisipasi kepemimpinan dalam organisasi.

© 2019, Universitas Negeri Semarang

ISSN 2549-5011

[✉]Corresponding author :

Address: Gedung C4 lantai 1 FIS Unnes, jalan kampus Timur I
Sekaran, Kec. Gunungpati Semarang
E-mail: nugraheni.arum@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia dan mengemukakan pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, menuntut, dan mendukung kebijakan pemerintah, serta melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Indonesia juga merupakan negara yang terdiri atas banyak kelompok kepentingan yang mencerminkan implementasi dari demokrasi seperti kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok nelayan, dan lain-lain. Setiap kelompok kepentingan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan kepentingan dan tujuan dari kelompok masing-masing tersebut mereka tidak segan untuk melakukan protes yang dapat berupa demonstrasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menyampaikan aksi protes dengan demonstrasi juga merupakan bentuk penyampaian pendapat dalam demokrasi yang Indonesia terapkan. Namun, demonstrasi tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan keributan atau keributan. Hal tersebut sangat mencederai demokrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi tersebut dapat menyebabkan timbulnya konflik yang berkepanjangan.

Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin dilenyapkan (Nasikun, 2003). Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia

hanya akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan. Seperti konflik nelayan dengan pemerintah yang menentang adanya Peraturan Menteri nomor 2/2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang atau pukat bala.

Peraturan menteri tersebut telah mengundang reaksi protes dari berbagai nelayan di Indonesia tak terkecuali nelayan di kabupaten Batang. Aksi protes yang dilakukan oleh nelayan di halaman kantor bupati Batang dan melakukan *long march* di jalan pantura dekat alun-alun kota Batang yang berakhir dengan sebuah bentrokan dengan aparat kepolisian setempat. Aksi protes yang berakhir dengan bentrokan tersebut dilatarbelakangi karena ketidaksetujuan nelayan terhadap peraturan menteri yang dianggap merugikan kaum nelayan. Larangan penggunaan cantrang atau pukat bala dianggap merugikan oleh kaum nelayan di kabupaten Batang. Ini dikarenakan para nelayan di kabupaten Batang yang melakukan aksi protes bahwa penggunaan cantrang atau pukat bala tidak merusak ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan-ikan kecil, dan biota laut lainnya. Mengingat pentingnya penanganan konflik maka diperlukan kajian penelitian tentang Strategi Komunikasi dalam Upaya Penyelesaian Konflik Nelayan Pantai Utara di Kabupaten Batang.

METODE

Pendekatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang terbagi menjadi dua skema besar: pencarian data sekunder maupun pengambilan data primer. Data primer

sendiri merupakan bahan mentah yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan referensi-referensi sekunder yang didapatkan melalui jurnal maupun media baik online maupun cetak yang digunakan untuk pendalaman materi. Pencarian data primer, dilakukan melalui proses FGD (*Focus Group Discussion*) dan juga IDI (*In Depth Interview*) yang dilanjutkan dengan wawancara semi terstruktur maupun analisa verbatim. Setelah mendapatkan informasi primer dan sekunder. Peneliti juga akan menggabungkan sumber opini lain sebagai penguat argumentasi, yakni menggunakan data sekunder yang diambil dari Buku, Majalah, Jurnal yang terkait untuk pengembangan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan penyelesaian suatu konflik yang diakibatkan pembaruan program pemerintah tentunya tidak terlepas dari bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam konflik. Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik nelayan di pantai utara Kabupaten Batang, dengan mengacu pada beberapa indikator yaitu kepemimpinan, strategi komunikasi, dan dimensi partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi dan studi dokumen. Berikut akan dijelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Strategi Pemimpin dalam Pengelolaan Konflik

Konflik merupakan suatu bagian dari kehidupan yang tidak dapat dilepaskan. Namun, konflik dapat terselesaikan dengan baik melalui peran penting seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini yaitu pemimpin (pemerintah daerah Kabupaten Batang) dan pemimpin (pemimpin kelompok masyarakat nelayan dukuh Mangunsari Desa Kedawung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang). Sinkronisasi antara pemerintah dan pemimpin kelompok haruslah tetap terjaga demi terselesaikannya konflik yang timbul akibat penggantian dari alat tangkap cantrang ke alat tangkap ikan gillnet yang ramah lingkungan.

Penyelesaian konflik antara nelayan dan pemerintah terkait penggantian alat tangkap

ikan berupa cantrang yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan cantrang atau pukat bala, yaitu pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batang juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan Banyuputih. Dua instansi kecamatan ini mempunyai petugas penyuluh lapangan yang ditugaskan khusus untuk menangani permasalahan ini. Sehingga antara pihak pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pihak Kecamatan Banyuputih dan ketua kelompok nelayan saling berkoordinasi.

Cara komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui sosialisasi langsung kepada kelompok masyarakat nelayan. Sosialisasi dilakukan oleh petugas khusus dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak kecamatan yang menangani masalah penggantian alat tangkap ikan cantrang tersebut. Pemberian informasi dilakukan secara berkala, namun dalam rentang waktu yang tidak pasti. Terkadang satu bulan sekali bahkan hingga dua bulan sekali. Cara komunikasi juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Batang melalui sebuah forum terbuka yang diselenggarakan di aula pendopo kabupaten Batang setiap hari Jumat sore. Semua golongan masyarakat diperbolehkan hadir untuk menyampaikan aspirasinya baik dukungan, keluhan, maupun kritikan. Forum terbuka ini merupakan salah satu akses bagi kaum nelayan untuk menyuarakan tuntutannya. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, forum terbuka yang diadakan setiap Jumat ini hanya ada pada masa pemerintahan periode yang lalu. Sekarang ini cara komunikasi hanya dilakukan melalui perantara petugas penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dan petugas penyuluh dari kecamatan dan sudah tidak dapat lagi menyuarakan aspirasinya langsung kepada Bupati Batang.

Bentuk interaksi yang dilakukan berupa *face to face* antara pihak pemerintah dan ketua serta kelompok masyarakat nelayan dalam suatu forum perkumpulan. Dalam bentuk inilah biasanya pemerintah maupun ketua kelompok masyarakat nelayan diberikan motivasi. Cara pemimpin baik pemerintah

maupun ketua kelompok masyarakat nelayan juga dalam menyelesaikan konflik yang sulit ditangani yaitu dengan melakukan musyawarah. Kultur masyarakat yang mempunyai tingkat kekerabatan dan solidaritas yang tinggi seperti ini, hampir setiap hari selalu mengadakan perkumpulan. Perkumpulan ini selain mempererat hubungan antar masyarakat tetapi juga mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal. Pengaruh ketua kelompok masyarakat nelayan sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik terutama dalam pengambilan keputusan yang akan diikuti oleh anggota lain dan mudah disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy: 2005: 32).

Strategi komunikasi yang digunakan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan pendekatan komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, dan komunikasi secara persuasif. Strategi komunikasi kelompok selalu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam penyelesaian konflik. Komunikasi kelompok yang dilakukan pemerintah dengan cara menggandeng kelompok lain seperti kelompok pecinta lingkungan dengan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang akan merugikan nelayan sendiri. Hal ini terjadi karena semakin berkurangnya benih ikan di laut ada saat menggunakan cantrang benih-benih ikan juga akan ikut terjaring. Sehingga ekosistem laut juga akan terganggu.

Bentuk komunikasi kelompok juga dilakukan melalui program penyuluhan dan pelatihan yang sudah digagas oleh pemerintah pusat yaitu dengan mengumpulkan kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Penyuluhan dan pelatihan ini, pemerintah juga turut memberikan

bantuan penggantian alat tangkap ikan berupa cantrang ke *gillnet milineum* kepada nelayan. Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada ketua kelompok masyarakat nelayan di desa Kedawung, belum sepenuhnya diganti oleh pemerintah. Dari jumlah penduduk desa yang bermata pencaharian sebagai nelayan sekitar 150-an baru 10 biji (alat tangkap ikan *gillnet millennium*) yang diganti oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihak nelayan di desa Kedawung sudah mengajukan proposal terkait penggantian cantrang dan masih menunggu sikap pemerintah kabupaten dalam menangani masalah tersebut.

Strategi pendekatan melalui komunikasi interpersonal cukup efektif dalam menangani masalah ini. Strategi komunikasi ini dapat berupa pemberitahuan informasi ataupun himbuan kepada masyarakat nelayan secara langsung, sehingga ada tatap muka atau *face to face* antara pihak petugas penyuluh lapangan dari pemerintah kepada ketua dan anggota kelompok nelayan. Berdasarkan hasil wawancara kami, penggantian alat tangkap cantrang sudah memakan waktu selama satu tahun dari penyerahan proposal ke pihak pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya. Kunjungan atau *penilikan* ini dilakukan baik oleh petugas penyuluh dari kecamatan maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Strategi ini berdampak baik mengingat penggantian alat tangkap berupa cantrang membutuhkan waktu yang lama. Pemberitahuan perkembangan informasi secara berkala dapat mencegah terjadinya konflik pada tahun 2015 lalu terulang kembali.

Strategi komunikasi massa dengan memanfaatkan media masa yang ada seperti *facebook* dan radio. Di kabupaten Batang, pemerintah biasanya menggunakan media ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Batang termasuk penggantian alat ikan berupa cantrang. Biasanya pemberitahuan-pemberitahuan terkait perkembangan ini akan diinformasikan kepada masyarakat luas.

Strategi komunikasi secara persuasif merupakan strategi yang sering diterapkan oleh pemerintah terlebih petugas penyuluh lapangan dalam mengajak masyarakat nelayan untuk turut serta aktif dalam setiap kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait penggantian alat tangkap cantrang ini. Strategi pendekatan ini diselingi dengan pemberian motivasi kepada nelayan.

Strategi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok masyarakat nelayan itu sendiri yaitu dengan rutin mengadakan perkumpulan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota nelayan. Tidak adanya strategi khusus yang diterapkan. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan sudah mempunyai kesadaran akan persatuan menjaga tali persaudaraan diantara nelayan untuk meningkatkan perekonomian melalui hasil-hasil tangkapan para nelayan. Beberapa yang masih menjadi permasalahan para nelayan yaitu terkait penggantian alat tangkap ikan yang belum merata, pendangkalan lokasi perahu, dan tidak adanya aliran sungai. Melalui perkumpulan ini, masyarakat berdiskusi untuk menemukan solusi-solusi terbaik yang dapat diterapkan seperti meminta bantuan kepada pemerintah.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten maupun ketua kelompok masyarakat nelayan membawa dampak yang positif. Masyarakat nelayan menjadi sabar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dari pihak luar. Strategi ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya konflik antara nelayan dan pemerintah terulang kembali. Penanaman motivasi dan himbuan-himbuan membuat masyarakat paham akan maksud kebijakan yang sedang pemerintah galakan bagi seluruh nelayan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada ketua kelompok nelayan mengatakan bahwa berdemonstrasi hanya akan menghabiskan waktu saja dan merugikan kami para nelayan karena kami tidak mendapatkan hasil tangkapan, sedangkan kebutuhan setiap hari harus dipenuhi. Oleh karena itu, saya sebagai ketua kelompok nelayan melarang anggota saya untuk terlibat dalam demonstrasi yang berujung konflik tersebut. Kami memilih untuk mengikuti prosedur dari pemerintah.

Secara sederhana komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan

lain-lain. Kepala desa dalam hal ini melalui ketua kelompok nelayan dituntut untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik ke seluruh masyarakatnya. gaya komunikasi yang baik secara langsung bisa membuat situasi kegiatan pemerintahan maupun pembangunan di desa lebih pesat, baik secara langsung berbentuk infrastruktur maupun modal sosial yang dimiliki individu kepala desa maupun masyarakat secara keseluruhan (Arumsari, 2016)

Dimensi Partisipasi Politik

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik

Bentuk partisipasi kelompok masyarakat nelayan di desa Kedawung dalam penyelesaian konflik cukup tinggi. Hal ini juga disebabkan kultur masyarakat yang menyukai adanya rembug desa. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang telah mendarah daging seperti seringnya masyarakat melakukan perkumpulan-perkumpulan kecil anggota nelayan. Berawal dari hal kecil tersebut yang menjadi kebiasaan berujung pada kompaknya anggota masyarakat nelayan dalam penyelesaian konflik. Jika terjadi suatu masalah yang dialami oleh nelayan mereka selalu sigap saling membantu satu sama lain.

Bentuk keterlibatan dalam penyelesaian konflik yaitu sebagai penyedia sarana dan prasarana. Penyedia tempat untuk musyawarah dan sebagai mediator. Hal ini tidak terlepas dari peran penting ketua kelompok masyarakat nelayan dalam menyelesaikan konflik. Keaktifan seorang pemimpin dan tanggap dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, menyebabkan setiap permasalahan yang timbul cepat terselesaikan. Sehingga, tidak ada konflik yang berlarut-larut.

Partisipasi masyarakat nelayan dalam penyelesaian konflik penggantian cantrang ini ternyata sudah cukup bagus. Masyarakat melalui ketua kelompok masyarakat nelayan berkoordinasi terlebih dahulu kepada petugas penyuluh lapangan dari pihak kecamatan, jika tidak mendapatkan hasil, maka ketua kelompok masyarakat nelayan beserta perwakilan anggota nelayan menemui

pemerintah di kabupaten khususnya kepada bupati dan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan penggantian alat tangkap ikan tersebut. Pemerintah kabupaten Batang bersama-sama Dinas Kelautan dan Perikanan juga pihak kecamatan aktif dalam memberikan solusi-solusi sementara. Karena memang proses penggantian alat tangkap ikan ini juga pemerintah kabupaten juga harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten Batang membuka diri untuk masyarakat nelayan khususnya mengenai permasalahan tersebut.

Sejauh ini baik pemerintah maupun ketua kelompok masyarakat nelayan sudah sangat aktif dalam memberikan motivasi dorongan kepada anggota untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan termasuk penyelesaian permasalahan yang timbul. Seperti yang diungkapkan oleh Brubaker, melalui dialog keagamaan ternyata juga dapat meminimalisir konflik, karena melalui dialog keagamaan yang dilakukan secara intens mampu menjawab keterbukaan dan meminimalisir prasangka dari satu individu dengan yang lain (Brubaker, 2015)

2. Partisipasi Kepemimpinan dalam Organisasi

Di Kabupaten Batang terdapat kepengurusan nelayan yang merupakan cabang dari persatuan nelayan se-Indonesia. Perwakilan cabang nelayan ini khusus mengurus nelayan yang ada di Kabupaten Batang. Dalam kepengurusannya terdapat ketua dewan pimpinan cabang yang memberikan komando kepada nelayan di kabupaten Batang. Di kabupaten Batang terdapat 7 desa nelayan di sepanjang pesisir di pantai utara kabupaten Batang, yaitu desa Seklayu (Dukuh Mangunsari Desa Kedawung), desa Pelabuhan, Roban Barat, Roban Timur, Situri, dan di kota Batang. Ketua dewan pimpinan cabang atau pemimpin nelayan daerah kabupaten Batang tersebut yang mengkoordinir kelompok-kelompok nelayan yang telah disebutkan di atas.

Pemimpin dalam hal ini ketua pimpinan cabang persatuan nelayan di Kabupaten Batang mempunyai peran sentral dalam penyelesaian konflik nelayan ini. Pemimpin mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam

setiap pengambilan keputusan. Komando dari seorang pemimpin merupakan perwakilan suara dari seluruh nelayan di pantai utara Kabupaten Batang. Oleh karena itu, pemimpin nelayan daerah mempunyai peranan yang cukup penting dalam memimpin dan memberikan arahan terhadap konflik yang dihadapi. Peran utama pemimpin nelayan daerah saat ini yaitu memperjuangkan hak-hak nelayan untuk mendapatkan penggantian alat tangkap ikan bagi seluruh nelayan sesuai yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

Dalam konflik nelayan tersebut, hubungan antara kelompok nelayan satu dengan kelompok nelayan lain yang ada di pantai utara Kabupaten Batang cukup baik. Hal ini tercermin dalam kekompakannya dalam mengawal penggantian alat tangkap ikan cantrang bagi seluruh nelayan pasalnya pemerintah belum sepenuhnya mengganti alat tangkap ikan pengganti. Hubungan solidaritas antar kelompok nelayan yang ada di sepanjang pantai utara kabupaten Batang terjalin sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, konflik yang berujung bentrokan yang terjadi di alun-alun Kabupaten Batang yaitu bukan murni dari kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Batang, melainkan para awak kapal besar yang berdemonstrasi dan melakukan kericuhan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat nelayan di pantai utara Kabupaten Batang memiliki koordinasi yang baik untuk tidak melakukan demonstrasi.

Interaksi yang terjadi antar satu kelompok nelayan dengan kelompok nelayan lain sudah sangat baik, namun yang berhubungan dekat hanya antar ketua kelompok nelayan saja. Interaksi yang terjadi yaitu biasanya pada saat rapat atau perkumpulan ketua nelayan saja. Interaksi yang intens terjadi yaitu antar anggota dalam satu kelompok nelayan. Terdapat program-program yang dilakukan oleh perkumpulan nelayan di kabupaten Batang ini. Fokus utamanya yaitu pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di pesisir pantai utara. Program ini diterapkan dengan pemberian pelatihan terhadap nelayan itu sendiri dan kepada istri-istri nelayan dalam menjadikan peluang berwirausaha melalui hasil tangkapan ikan. Pada saat ini, fokus utama program yang

sedang diintensifkan yaitu penggantian alat tangkap agar segera direalisasikan.

SIMPULAN

Strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik nelayan di pantai utara Kabupaten Batang, dengan mengacu pada beberapa indikator yaitu (1) kepemimpinan yang berupa strategi pemimpin dalam pengelolaan konflik dengan menggunakan bentuk forum terbuka melalui komunikasi secara langsung atau *face to face*, (2) strategi komunikasi yang digunakan dengan pendekatan komunikasi kelompok dan komunikasi persuasif melalui pelatihan dan penyuluhan sehingga komunikasi interpersonal antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan efektif, dan (3) dimesi partisipasi politik yang terdiri dari keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui penyediaan sarana dan prasarana dan juga partisipasi kepemimpinan dalam organisasi yang mempunyai peran utama sebagai pemimpin nelayan daerah dengan memperjuangkan hak-hak nelayan untuk mendapatkan penggantian alat tangkap ikan bagi seluruh nelayan sesuai yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, Nugraheni. 2016. Komunikasi Politik Kepala Desa Dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 2, No 1 (In Press)
- Brubaker, R. (2015). Religious dimensions of political conflict and violence. *Sociological Theory*, 33(1), 1-19.
- Efendy, Onong Uchana. 2005. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Littlejohn, Karen A. Foss edisi 2009, Teori Komunikasi. Bandung: Alumnus
- Rahim, M. A. (1985). A strategy for managing conflict in complex organizations. *Human Relations*, 38(1), 81-89.
- Sendjaja, Djuarsa Sasa. 1996. Pengantar Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Seftyono, Cahyo, Nugraheni Arumsari, Erisandi Arditama dan Muhammad Luthfi (2016), Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aras Lokal: Kajian Awal di Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah, Otoritas, Vol. 6 No. 2 (In Press).
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.
- Weidmann, N. B. (2015). Communication, technology, and political conflict Introduction to the special issue. *Journal of Peace Research*, 0022343314559081.
- <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/8488>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 72 Tahun 2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.